



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUK WALUYO RAHARJO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **441741**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.780.000.000**

1. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah Seluas 5305 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000
6. Tanah Seluas 2830 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 130.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 635 m2/200 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 1.350.000.000
8. Tanah Seluas 2310 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 6235 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 120.000.000
10. Tanah Seluas 3520 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 110.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 114.500.000**

1. MOBIL, KIA CARENS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



3.500.000

3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

21.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 44.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 745.985.786

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 3.684.485.786

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 3.684.485.786

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.